



Unas Rugikan Negara Rp 17,1 Miliar

■ Hasil Pemeriksaan BPK

JAKARTA - Dugaan adanya korupsi dalam penyelenggaraan ujian nasional (unas) bukan isapan jempol. Kemarin (19/9) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan ujian nasional (unas) 2013 dan 2012. Hasilnya, ditemukan kerugian negara Rp 17,1 miliar dalam ujian tahunan itu.

BPK mengungkapkan, penyimpangan terjadi sejak proses lelang unas 2013 sehingga menimbulkan potensi kerugian negara Rp 6,34 miliar. Penyimpangan serupa terjadi pada lelang unas 2012 dengan kerugian negara Rp 8,15 miliar.

Dalam lelang unas 2013, kerugian negara masih berupa potensi karena sampai saat ini uang tendernya belum dibayarkan ke percetakan. "Jika sudah dibayarkan, baru itu tingkatannya naik menjadi kerugian negara," kata anggota BPK Rizal Djalil di kantornya kemarin.

Sementara itu, kasus unas 2012 sudah menimbulkan kerugian negara karena uang lelang sudah dibayarkan ke percetakan. Karena itu, BPK sudah melaporkan kasus lelang unas 2012 yang merugikan negara Rp 8,15 miliar tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rizal menyampaikan, modulus penyimpangan dalam lelang tersebut sangat banyak. Misalnya, penunjukan pemenang lelang yang sejatinya tidak memiliki kapasitas

untuk mengerjakan pengadaan naskah unas sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kunjungan panitia lelang ke perusahaan peserta lelang tidak dijalankan dengan baik. "Karena itu, ada perusahaan yang sejatinya kapasitasnya tidak mampu, tetapi dimenangkan dalam lelang," ungkapnya.

Kasus tersebut akhirnya menimbulkan dampak berupa kacaunya pelaksanaan unas 2013. Saat itu, unas SMA dan SMP sempat ditunda untuk sebelas provinsi. Selain itu, terjadi kasus fotokopi naskah unas di sejumlah daerah karena naskah asli kurang.

Kabid Auditorat VI-A2 BPK Akhsanul Khaq menyatakan, dalam penentuan pemenang lelang, Kemendikbud tidak mencari peserta yang menawar dengan harga terendah. "Dengan demikian, bisa menghemat uang negara," katanya. Waktu itu, Kemendikbud beralasan peserta lelang dengan penawaran rendah diklaim tidak mampu mengerjakan penggandaan naskah ujian.

Selain urusan lelang, kasus unas berwujud belanja fiktif dan penggelembungan anggaran serta pemotongan sejumlah pos anggaran. BPK menghitung, pada unas 2012 dan 2013, terjadi belanja fiktif dan penggelembungan anggaran Rp 1,77 miliar serta pemotongan belanja Rp 888,6 juta.

Buntut banyaknya penyim-

pangan itu, BPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Yakni, meminta Mendikbud menyerahkan pelaksanaan teknis unas kepada pemerintah provinsi (pemprov). "Kemendikbud cukup melaksanakan perencanaan, monitoring, supervisi, dan evaluasi," katanya.

Rekomendasi lainnya, BPK meminta pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Mereka menilai kinerja BSNP tersebut tidak optimal. Selain itu, koordinasi mereka dengan Kemendikbud dan pemda masih lemah. Khususnya, membagi anggaran penyelenggaraan unas yang ditanggung APBN dan APBD. Jika Kemendikbud tidak berkenan membubarkan BSNP, BPK meminta ada evaluasi terhadap badan otonom itu.

Rizal menuturkan, sejatinya Kemendikbud sudah melayangkan respons tertulis atas hasil pemeriksaan BPK tersebut. Isinya, Kemendikbud mengakui adanya kelemahan dalam perencanaan dan lelang unas.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar mengungkapkan, pihaknya telah mendorong internal Kemendikbud untuk menuntaskan seluruh rekomendasi BPK atas pelaksanaan unas 2013 dan 2012. Terutama unit utama yang terkait dengan unas, yakni Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud.

Terkait dengan adanya laporan kerugian negara, Haryono meminta Kemen-

dikbud segera menyerahkan kembali uang kerugian itu ke negara. Jika kerugian negara tersebut berkaitan dengan aturan yang dilanggar, adanya pelaku lain, dan memperkaya oknum, kasus bisa diusut menjadi korupsi. "Protap BPK memang melanjutkan hasil pemeriksaan itu ke penegak hukum. Kami siap," tegasnya.

Haryono mengungkapkan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK itu hampir sama dengan hasil audit Itjen Kemendikbud. Intinya, kata dia, harus ada pembenahan besar-besaran di Kemendikbud.

Sampai sekarang, kasus belanja fiktif masih saja terjadi. Kasus itu bisa dicek dari tidak adanya manifes penerbangan, rekayasa struk menginap di hotel, dan sejenisnya. Dia meminta kasus-kasus seperti itu tidak terulang.

Haryono menyatakan, rekomendasi pembenahan besar-besaran tidak akan melumpuhkan kinerja Kemendikbud. "Niat kami baik. Yakni, untuk pembenahan internal Kemendikbud dan merembet ke perbaikan layanan pendidikan masyarakat," ujar mantan pimpinan KPK itu.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Julian-tari menilai, kerugian negara yang ditemukan BPK tersebut sangat kecil. "Padahal, kita tahu bersama, kisruh yang ditimbulkan gara-gara unas 2013 sangat besar," ungkapnya.

Tari, sapaan akrabnya, meminta Kemendikbud membandingkan hasil audit versi BPK dengan Itjen Kemendikbud. Dia mendorong, setelah ditemukan kerugian negara, penegak hukum untuk bertindak profesional mengusutnya. (wan/c5/kim)